



Analisis keuangan inklusif dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Utara

Frederic W. Nalle¹, Felisisima Afoan²

^{1,2} Universitas Timor

¹Frederic.Nalle@gmail.com, ²Afoan.felisisima@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 11 Januari 2022

Disetujui 14 Februari 2022

Diterbitkan 20 Februari 2022

Kata kunci:

Belanja Modal,

Dana Perimbangan,

Dana Silpa

Kemiskinan

ABSTRAK

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu provinsi dengan Presentase kemiskinan terbesar di Indonesia setelah Provinsi Papua dan Papua Barat. Tingginya prosentase jumlah penduduk miskin di Provinsi NTT salah satu penyumbang terbesar datang dari Kabupaten Timor Tengah Utara. Rilis data Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Kabupaten TTU merupakan Kabupaten penyumbang angka kemiskinan tertinggi ke delapan (8) dari 22 Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah otonom Provinsi NTT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variable pengeluaran belanja modal, dana perimbangan dan dana Silpa terhadap kemiskinan di Kabupaten TTU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan masing-masing variable bebas memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten TTU.

ABSTRACT

East Nusa Tenggara Province is one of the provinces with the largest poverty percentage in Indonesia after Papua and West Papua Provinces. The high percentage of the number of poor people in NTT Province, one of the biggest contributors comes from the North Central Timor Regency. The data released by the Central Statistics Agency noted that TTU Regency was the eighth (8) highest contributor to poverty out of 22 Regencies/Cities in the autonomous region of NTT Province. This study aims to determine the effect of the variable capital expenditures, balancing funds and Silpa funds on poverty in TTU Regency. The results showed that either partially or simultaneously each independent variable had a significant effect on poverty in TTU Regency.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kemiskinan yang menjadi salah satu masalah pembangunan di Indonesia membuat pemerintah harus berupaya untuk mengurangi kemiskinan dengan berbagai program dan pembiayaan. Salah satu upaya pembiayaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum yang diberikan oleh Pemerintah Pusat (Pempus) ke Pemerintah Daerah (Pemda). Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, PAD berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

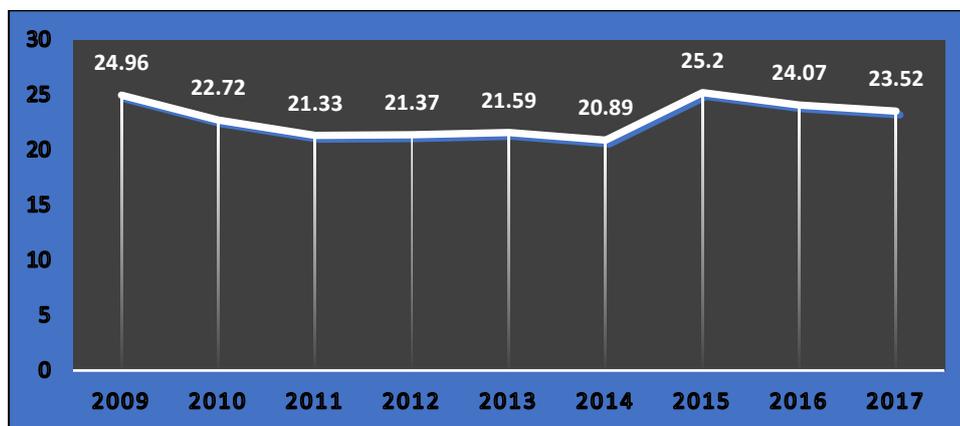
Selain dari PAD dan DAU pemerintah juga mengeluarkan dana untuk mengentaskan kemiskinan berupa dana dari Belanja Sosial. Berdasarkan Peraturan Presiden No.46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, dinyatakan bahwa “Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanggulangan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara dan inklusivitas”.

Selain itu, implikasi dari pemberian kewenangan otonomi menuntut kreativitas dan kemandirian pemerintah daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Pemerintahan daerah diharapkan mampu menggali dan mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki sehingga pembangunan yang dilaksanakan diharapkan banyak memberikan manfaat bagi daerah, seperti: (i) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik; (ii) mendorong perkembangan perekonomian daerah; (iii) meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; (iv) meningkatkan pendapatan asli daerah; dan (v) mendorong kegiatan investasi. Dengan demikian, dalam upaya menyusun pembangunan, maka daerah dituntut untuk bisa memanfaatkan aspek-aspek sumberdaya, seperti potensi sumberdaya alam, potensi sumber daya manusia, dan potensi internal (endowment) lainnya.

Namun, pelaksanaan pembangunan di daerah selama ini dinilai kurang begitu memuaskan, karena masih begitu banyaknya daerah yang kurang bisa mengelola sumberdaya potensialnya. Secara empiris, banyak program dan kegiatan pembangunan daerah yang kurang sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat, atau tidak sesuai dengan apa yang seharusnya menjadi skala prioritas daerah. Di satu sisi, angka pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan juga masih sangat tinggi. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi kesalahan model perencanaan di daerah. Konsep perencanaan seperti ini pada akhirnya tidak mampu menciptakan hasil pembangunan yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan.

Permasalahan yang sering dihadapi oleh para perencana pembangunan, di daerah adalah penyusunan perencanaan yang kurang akomodatif terhadap potensi yang dimiliki. Proses perencanaan seringkali hanya berhenti pada proses inventarisasi potensi. Selain itu, beberapa penelitian juga mengungkapkan bahwa identifikasi yang sudah dilakukan oleh daerah seringkali hasilnya tidak dapat diterapkan secara umum karena pada dasarnya setiap daerah memiliki kekhasan dan potensi yang berbeda. Kondisi demikian mengharuskan perencanaan pembangunan di daerah perlu memahami karakter ekonomi, sosial dan fisik, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Sehingga tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah, karena pada dasarnya tidak ada satu daerahpun yang memiliki karakteristik yang sama (Kartasasmita, 2002). Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mengerti, kreatif, dan berkompeten dalam merancang pembangunan. Beberapa permasalahan perencanaan pembangunan sebagaimana disebutkan diatas merupakan isu utama di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), yang merupakan salah satu Kabupaten dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Isu belum optimalnya perencanaan pembangunan yang berkualitas di Kabupaten TTU diindikasikan oleh beberapa fakta sebagai berikut:

Pertama, dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten TTU (2020) dapat diketahui bahwa salah satu persoalan belum optimalnya pembangunan ekonomi di Kabupaten TTU dapat terpresantasikan lewat ukuran ketimpangan pendapatan serta rendahnya IPM. Indikasi dari belum optimalnya pembangunan ekonomi di Kabupaten TTU sehingga berimplikasi terhadap tingkat kemiskinan sebagaimana yang dimaksud dalam pernyataan di atas dapat diketahui dari grafik di bawah ini.



Gambar 1 Prosentase Penduduk Miskin Kabupaten TTU Tahun 2009-2017
Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder Tahun 2020

Berdasarkan gambar 1 di atas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2009 hingga tahun 2017 tingkat kemiskinan masih cukup tinggi dan cenderung stagnan. Kondisi kemiskinan yang terjadi di Kabupaten TTU jika dikonfersi dengan berbagai paket kebijakan melalui instrumen kebijakan fiskal sangat masif dilakukan. Ada bantuan anggaran yang dikucurkan dari dana APBN seperti Anggaran Dana Desa (ADD), dari pemerintah Provinsi NTT melalui program Desa Mandiri Anggur Merah, serta juga bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten TTU seperti dana Program Sari Tani dan Padat karya Pangan (PKP), akan tetapi masyarakat tetap tidak mampu keluar dari lingkaran kemiskinan.

Kedua, salah satu persoalan kondisi perekonomian yang kurang baik adalah karena struktur APBD yang kurang mendukung. Hal ini dapat menjadi landasan teoritis dalam meninjau kenapa kondisi perekonomian di Kabupaten TTU sangat buruk, terutama persoalan kemiskinan di sektor pertanian. Secara teoritis, hubungan antara kondisi makro daerah terutama kemiskinan sektor pertanian dengan struktur APBD adalah kaitannya dengan belanja modal. Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004). Dimana syarat pembangunan ekonomi ini adalah tingkatan pengadaan modal pembangunan yang harus seimbang dengan pertambahan penduduk. Sehingga bertambahnya infrastruktur dan perbaikan lainnya oleh pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain itu, keterkaitan lainnya antara pertumbuhan daerah dengan dana pemerintah daerah adalah hubungannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan belanja modal. Daerah yang ditunjang dengan infrastruktur yang memadai akan berpengaruh pada tingkat produktivitas masyarakat dan akan menarik investor untuk menanamkan modalnya pada daerah tersebut. Kondisi ini secara otomatis akan menambah pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Selain itu, peningkatan investasi modal juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari peningkatan PAD. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Selain itu, peningkatan investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD (Mardiasmo, 2002). Dengan kata lain pembangunan berbagai fasilitas sektor publik akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah dan pelaksanaan desentralisasi membuat pembangunan menjadi prioritas utama oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. Oleh karena itu, desentralisasi fiskal pemerintah daerah diharapkan lebih optimal kemampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga pemerintah daerah bisa lebih fokus untuk menggunakan PAD yang dimiliki untuk membiayai belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan publik. Untuk lebih mengetahui bagaimana struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten TTU pada tahun 2015 dapat diketahui di bawah ini:

Tabel 1 Perbandingan Belanja Operasional dan Belanja Modal Kab. TTU Tahun 2015

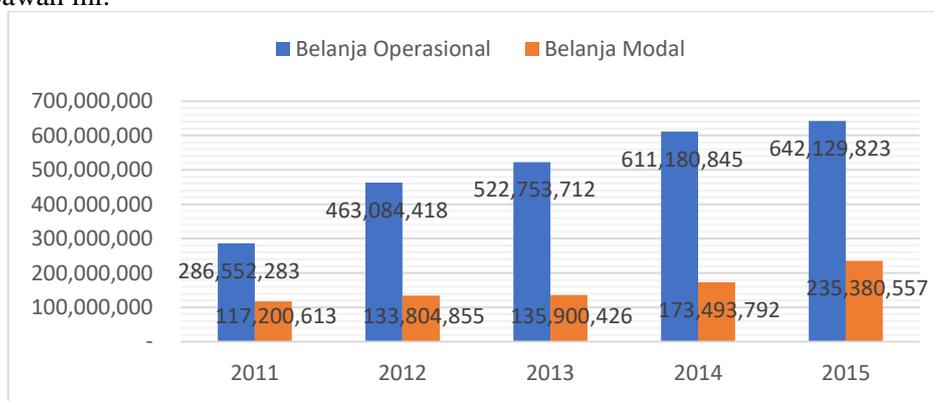
Jenis Pengeluaran	Rencana	Realisasi	Persentase Realisasi
Belanja			
1. Belanja Operasional	642.129.823	569.098.017	88,63
1.1. Belanja Pegawai	435.763.152	399.465.776	91,67
1.2. Belanja Barang	180.084.151	149.576.919	83,06
1.3. Subsidi	-	-	-
1.4. Belanja Hibah	25.432.521	20.055.321	78,86
1.5. Belanja Bantuan Sosial	850.000	-	-
1.6. Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-
2. Belanja Modal	235.380.557	156.625.428	66,54
2.1. Belanja Tanah	2.289.098	1.524.963	66,62
2.2. Belanja Peralatan Mesin	57.625.715	42.415.521	73,61
2.3. Belanja Bangunan dan Mesin	33.452.449	12.738.973	38,08
2.4. Belanja jalan, irigasi dan Jaringan	139.429.753	98.144.423	70,39
2.5. Belanja aset tetap lainnya	2.583.542	1.801.548	69,73
2.6. Belanja aset lainnya	-	-	-
3. Belanja Tak Terduga	325.000	-	-
3.1. Belanja Tak Terduga	-	-	-
Jumlah/Total	877.510.380	725.723.445	82,67

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. TTU Tahun 2020

Berdasarkan Table 1. di atas terlihat bahwa kondisi ideal untuk menilai bagaimana postor anggaran yang berpihak kepada rakyat melalui distribusi anggaran tidak ditemukan pada Kabupaten TTU. Hal ini turut menjelaskan bahwa persoalan kemiskinan yang tinggi di Kabupaten TTU ternyata juga dipengaruhi oleh keuangan daerah yang sangat eksklusif. Maksud dari pernyataan eksklusifitas Postur APBD dalam penelitian ini adalah pola Perencanaan dan Pengendalian Belanja Daerah dalam Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terkesan masih sangat timpang antara alokasi anggaran untuk program pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat jika dibandingkan dengan pos belanja rutin lainnya.

Perencanaan dan pengendalian belanja merupakan aktifitas penting yang harus dilakukan pemerintah daerah, sebab belanja yang tidak terencana dan terkendali dengan baik dan akan menjadi sumber inefisiensi dan pemborosan uang negara. Agar pemerintah dapat mengelola belanja secara baik yaitu mampu memenuhi prinsip *value for money* atau penghargaan atas setiap rupiah uang negara (Mahmudi, 2009).

Untuk menyederhanakan pemahaman kita bagaimana timpangnya penyusunan dan pengelolaan struktur APBD antara belanja operasional dan belanja modal Kabupaten TTU dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.



Gambar 2 Perbandingan Belanja Operasional dan Belanja Modal Kab. TTU Tahun 2011 – 2015
Sumber : Hasil Olahan Data Sekunder Tahun 2020

Dalam gambar 2 di atas, dapat diketahui bahwa di dalam tata kelola keuangan daerah, struktur APBD Kabupaten TTU masih terdapat adanya inklusifitas keuangan daerah atau ketidakseimbangan alokasi pos penggunaan anggaran yang begitu besar antara Belanja Operasional dan Belanja Modal untuk mendukung program pembangunan. Jika dilihat dari total anggaran, penyerapan terbesar masih berkuat pada belanja operasional hingga mencapai 73,18%, sementara belanja modal yang sangat penting dalam pembangunan hanya sebesar 26,82%. Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan di Kabupaten TTU belum maksimal. Penyedotan anggaran masih berkuat pada belanja operasional. Khusus untuk item belanja pegawai sendiri besarnya hingga mencapai Rp. 435.763.152 atau sebesar 49,66 persen dari Total Rencana Anggaran Belanja Daerah di tahun 2015. Sedangkan Total anggaran Belanja Modal hanya sebesar Rp.235.380.557 atau sebesar 26,82 persen dari total rencana anggaran daerah. Sungguh adanya ketimpangan yang cukup besar yang terlihat dari alokasi Belanja Daerah ini menunjukkan bahwa ternyata struktur APBD Kabupaten TTU kurang efisien dalam orientasi pembangunan, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan.

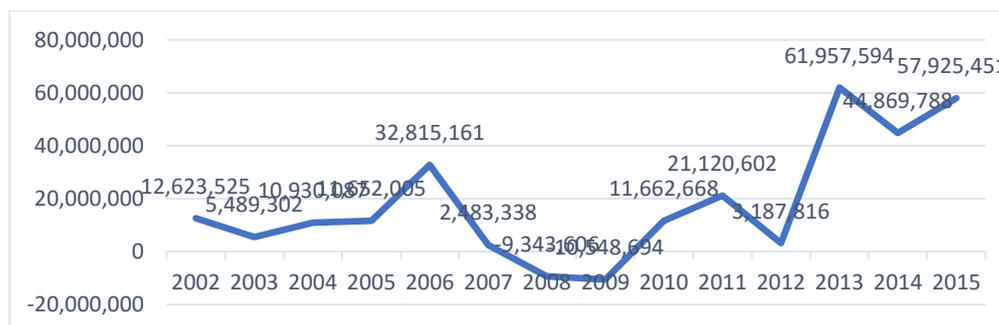
Ketiga, lebih jauh dari uraian di atas, maka adapun indikator penggunaan keuangan daerah Kabupaten TTU yang bisa dipergunakan untuk mengukur sejauhmana efektifitas penggunaan anggaran bagi pembangunan daerah. Indikator yang dilihat disini adalah realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Kabupaten TTU untuk tahun anggaran terhitung dari tahun 2002 hingga tahun 2015.

Tabel 2. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2002-2015

Tahun Anggaran	Penerimaan	Pengeluaran	Selisih	Prosentase
2002	176,759,297	164,135,772	12,623,525	92.86
2003	198,639,060	193,149,758	5,489,302	97.24
2004	200,436,842	189,506,755	10,930,087	94.55
2005	203,506,154	191,854,149	11,652,005	94.27
2006	301,445,002	268,629,841	32,815,161	89.11
2007	349,649,914	347,166,576	2,483,338	99.29
2008	393,162,161	402,505,767	-9,343,606	102.38
2009	412,691,473	423,239,695	-10,548,694	102.56
2010	415,415,564	403,752,896	11,662,668	97.19
2011	495,344,253	474,223,651	21,120,602	95.74
2012	549,015,092	545,827,276	3,187,816	99.42
2013	608,393,454	546,435,860	61,957,594	89.82
2014	688,661,451	643,791,663	44,869,788	93.48
2015	783,648,995	725,723,544	57,925,451	92.61

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. TTU Tahun 2020

Berdasarkan data pada table 3 di atas terlihat bahwa masih terdapat inefisiensi dalam penggunaan anggaran belanja pemerintah sehingga berimplikasi terhadap besaran sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) di Kabupaten TTU yang masih cukup tinggi. Terlihat bahwa setiap tahunnya terhitung sejak tahun 2002 walaupun dana silpa di Kabupaten TTU cukup fluktuatif akan tetapi cenderung mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kinerja sektor keuangan masih terdapat inefisiensi yang bisa berimplikasi pada program pembangunan daerah dan upaya pengentasan kemiskinan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar grafik trend dana silpa Kabupaten TTU di bawah ini.

**Gambar 3** Trend Dana SILPA Kabupaten TTU Tahun 2002-2015

Sumber: Hasil Olahan Data Sekunder Tahun 2020

Dalam grafik dan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa dengan adanya dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran setiap tahun yang cukup besar dan sangat bervariasi, maka ini menggambarkan bahwa masih terdapat lemahnya tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, sehingga berimplikasi pada kurang maksimalnya perwujudan pembangunan di Kabupaten TTU.

Keempat; masalah lain yang tidak kalah pentingnya adalah struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten TTU yang masih tergolong timpang antara besaran kucuran dana perimbangan yang diperoleh dari transfer pemerintah pusat (DAU, DAK dan Bagi Hasil Pajak ataupun Bukan Pajak) dibandingkan dengan penerimaan asli daerah berdasarkan potensi daerah seperti penerimaan pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat dalam struktur Pendapatan Asli Daerah kabupaten TTU di bawah ini:

Table 3 Rencana dan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Kab. TTU Tahun Anggaran 2015

Jenis Pendapatan	Rencana	Realisasi
1. Pendapatan Asli Daerah	38.552.199	33.167.381
a) Pajak Daerah	6.483.400	5.517.055
b) Retribusi Daerah	4.137.398	329.432
c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.963.825	3.963.825
d) Lain-lain PAD Yang Sah	23.967.576	23.357.069
2. Pendapatan Transfer	718.836.750	697.022.073
Transfer Pemerintah Pusat Dana	646.612.567	616.246.049
Perimbangan:		
a) Bagi Hasil Pajak	22.662.517	10.893.693
b) Bagi Hasil Bukan Pajak	2.362.267	10.893.693
c) Dana Alokasi Umum	529.736.673	72.320.586
d) Dana Alokasi Khusus	91.851.110	72.320.586
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya:		
a) Dana Penyesuaian	57.373.713	66.118.340
	57.373.713	66.118.340
3. Transfer Pemerintah Provinsi	14.850.470	14.457.683
a) Bagi Hasil Pajak	14.850.470	14.457.683
Jumlah/Total	757.388.949	730.189.454

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2020

Berdasarkan Table 4 di atas maka dapat diketahui bahwa salah satu persoalan yang cukup serius dalam mengukur kinerja penerimaan keuangan kita yang terpresentasikan lewat struktur Pendapatan Asli Daerah, masih terdapat ketimpangan yang cukup besar antara sumber Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan transfer baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi. Dengan struktur rencana dan realisasi anggaran pemerintah seperti di atas maka dapat diketahui bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten TTU terhadap pemerintah pusat untuk membiayai seluruh program pembangunan di daerah masih sangat berharap dari transfer pemerintah pusat lewat dana perimbangan baik itu Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Tercatat bahwa dari total rencana anggaran sebesar Rp. 757.388.949 (Miliar) besaran kucuran dana perimbangan sebesar Rp. 718.836.750 (miliar) atau sama artinya sebesar 94,91 persen dari total Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten TTU yang bersumber dari potensi regional baik itu dari objek pajak, retribusi maupun dari pengelolaan kekayaan lain yang sah sebesar Rp. 38.552.199, atau setara dengan 5,09 persen dari total seluruh penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten TTU. Sungguh ini merupakan sebuah ketimpangan dan juga ketergantungan pembiayaan pembangunan daerah yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat.

Beberapa permasalahan di atas menggiring pada isu bahwa kinerja sektor keuangan daerah guna mendukung program pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat belum dioptimalkan. Postur anggaran yang timpang antara belanja operasional dan belanja modal, tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap kucuran dana perimbangan serta tingginya besaran dana Silpa adalah serangkaian indikator yang dapat menunjukkan kepada kita bagaimana belum efektifnya kinerja keuangan daerah untuk mendukung gerak langkah roda ekonomi daerah. Sehingga salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah Kabupaten TTU sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah adalah bagaimana menyusun rencana kerja yang mampu mengakomodir segala potensi daerah yang dimiliki terutama peningkatan dan pelayanan sektor publik melalui kinerja keuangan yang baik sehingga turut membawa implikasi bagi peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara dengan Mengandalkan Badan Pusat Statistik sebagai sumber data. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian ini kurang lebih selama 6 bulan, terhitung dari bulan Mei s.d bulan oktober tahun 2021. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda yang dimana persamaannya adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon_i$$

Dimana:

$$\beta_0 : Y - \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2 - \beta_3 X_3$$

$$\beta_1 : \frac{(\sum X_{12})(\sum X_{1Y}) - (\sum X_1 X_1)(X_{1Y})^2}{(\sum X_{12})(\sum X_{12}) - (\sum X_1 X_1)^2}$$

$$\beta_2 : \frac{(\sum X_{22})(\sum X_{2Y}) - (\sum X_2 X_2)(X_{2Y})^2}{(\sum X_{22})(\sum X_{22}) - (\sum X_2 X_2)^2}$$

$$\beta_3 : \frac{(\sum X_{32})(\sum X_{3Y}) - (\sum X_3 X_3)(X_{3Y})^2}{(\sum X_{32})(\sum X_{32}) - (\sum X_3 X_3)^2}$$

Keterangan:

- Y : Tingkat Kemiskinan (*dependent* variabel)
- β_0 : Konstanta Intercept
- β_1 : Koefisien regresi X_1
- β_2 : Koefisien regresi X_2
- β_3 : Koefisien regresi X_3
- X_1 : Variabel Belanja Modal
- X_2 : Variabel Dana Perimbangan
- X_3 : Variabel Dana Silpa

HASIL DAN DISKUSI

Analisis Pengaruh Belanja Modal (X_1) Terhadap Tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten TTU.

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel belanja modal (X_1) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten TTU, dapat digunakan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan bantuan program SPSS 22.0 for windows yang dapat dilihat pada rekapitulasi hasil perhitungan di bawah ini:

Tabel. 9 Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Sederhana Pengaruh Variable X_1 Terhadap Y

Konstanta (β_0)	Koefisien Regresi ($b_1 X_1$)	Nilai Koefisien Korelasi (R)	R Square (R^2)	Nilai Adjusted R Square	Nilai Sig	Nilai t hitung
35,846	- 8,432	0,478	0,229	0,186	0,033	-2.310

Sumber: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2019

Besarnya nilai regresi antara variabel belanja modal (X_1) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten TTU adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \epsilon_i$$

$$Y = 35,846 - 8,432 X_1 + \epsilon_i$$

Keterangan:

Y = Tingkat kemiskinan

β_0 = Konstanta Intersept

β_1 = Koefisien variabel belanja modal

X_1 = Variabel belanja modal

ϵ_i = Kesalahan Pengganggu

Nilai $\beta_0 = 35,846$ ini menjelaskan bahwa jika tidak ada perubahan pada variabel belanja modal, maka variabel tingkat kemiskinan sebesar 35,846 tetapi jika ada penambahan pada variabel belanja modal sebesar 1 satuan, maka tingkat kemiskinan juga akan berkurang sebesar - 8,432.

Besarnya nilai koefisien korelasi (R) variabel kepercayaan konsumen (X1) terhadap variabel minat belanja online (Y) sebesar 0,646 yang artinya bahwa antara variabel kualitas produk dan variabel kepuasan nasabah mempunyai hubungan yang kuat. Menurut Sarwono (2006;45), Koefesien korelasi ialah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi antara dua variabel. Besarnya koefesien korelasi berkisar antara 0 s/d 1. Koefesien korelasi menunjukkan kekuatan (strength) hubungan linear dan arah hubungan dua variabel acak. Jika koefesien korelasi positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan searah. Artinya jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan tinggi pula. Sebaliknya, jika koefesien korelasi negatif, maka kedua variabel mempunyai hubungan terbalik. Artinya jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan menjadi rendah dan berlaku sebaliknya.

Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua variable, maka Sugiyono (2006) memberikan kriteria sebagai berikut:

0	= Tidak ada korelasi antara dua variable
0,10 – 0,19	= Sangat lemah
0,20 - 0,39	= Lemah
0,40 - 0,59	= Sedang
0,60 - 0,79	= Kuat
0,80 – 0,99	= Sangat kuat
1	= Korelasi sempurna

Koefisien determinan (R²) menjelaskan tentang variasi nilai tingkat kemiskinan (Y) ditentukan oleh variabel belanja modal (X1) yang diperhatikan. Dari hasil analisa koefisien determinan (R²) diperoleh sebesar 0,229 artinya bahwa besarnya variabel tingkat kemiskinan (Y) dipengaruhi oleh variabel belanja modal (X1) sebesar 29,9% dan sisanya sebesar 70,1% dipengaruhi oleh variabel X lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Untuk alpha (α) sebesar 0,05 dan dk = n – k (20–3=17) memperoleh ttabel sebesar 2,1098 dan thitung yang diperoleh sebesar –2,310. Dengan demikian maka nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel dimana 2,310>2,1098 dan juga nilai signifikansi yang lebih kecil dari alpha (0,033<0,05); maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel belanja modal (X1) terhadap variabel tingkat kemiskinan di Kabupaten TTU.

Analisis Pengaruh Dana Perimbangan (X2) Terhadap Tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten TTU.

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel dana perimbangan (X2) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten TTU, dapat digunakan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan bantuan program SPSS 22.0 for windows yang dapat dilihat pada rekapitulasi hasil perhitungan di bawah ini.

Tabel. 10 Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Sederhana Pengaruh Variable X2 Terhadap Y
 Konstanta

Konstanta (β0)	Koefisien Regresi (b ₂ X ₂)	Nilai Koefisien Korelasi (R)	R Square (R ²)	Nilai Adjusted R Square	Nilai Sig	Nilai t hitung
41,029	- 2,826	0,624	0,389	0,355	0,003	-3,387

Sumber: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2019

Besarnya nilai regresi antara variabel dana perimbangan (X2) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten TTU adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_2 X_2 + \epsilon_i$$

$$Y = 41,029 - 2,826 X_2 + \epsilon_i$$

Keterangan:

Y = Tingkat kemiskinan

β₀ = Konstanta Intersept

β₂ = Koefisien variabel dana perimbangan

X₂ = Variabel dana perimbangan

ε_i = Kesalahan Pengganggu

Nilai $\beta_0 = 41,029$ ini menjelaskan bahwa jika tidak ada perubahan pada variabel dana perimbangan, maka variabel tingkat kemiskinan sebesar 41,029 tetapi jika ada penambahan pada variabel dana perimbangan sebesar 1 satuan, maka tingkat kemiskinan juga akan menurun sebesar $-2,826$.

Koefisien determinan (R^2) menjelaskan tentang variasi nilai tingkat kemiskinan (Y) ditentukan oleh variabel dana perimbangan (X_2) yang diperhatikan. Dari hasil analisa koefisien determinan (R^2) diperoleh sebesar 0,389 artinya bahwa besarnya variabel tingkat kemiskinan (Y) dipengaruhi oleh variabel dana perimbangan (X_2) sebesar 38,9% dan sisanya sebesar 61,1% dipengaruhi oleh variabel X lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Untuk alpha (α) sebesar 0,05 dan $dk = n - k (20 - 3 = 17)$ memperoleh ttabel sebesar 2,1098 dan thitung yang diperoleh sebesar $-3,387$. Dengan demikian maka nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel dimana $2,1098 < -3,387$ dan juga nilai signifikansi yang lebih kecil dari alpha ($0,033 < 0,05$); maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel dana perimbangan (X_2) terhadap variabel tingkat kemiskinan di Kabupaten TTU.

Analisis Pengaruh Dana Silpa (X_3) Terhadap Tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten TTU.

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel dana Silpa (X_3) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten TTU, dapat digunakan analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan bantuan program SPSS 22.0 for windows yang dapat dilihat pada rekapitulasi hasil perhitungan di bawah ini:

Tabel. 10 Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Sederhana Pengaruh Variable X_3 Terhadap Y

Konstanta (β_0)	Koefisien Regresi ($\beta_3 X_3$)	Nilai Koefisien Korelasi (R)	R Square (R^2)	Nilai Adjusted R Square	Nilai Sig	Nilai t hitung
28,470	-7,724	0,032	0,001	-0,054	0,892	-0,137

Sumber: Hasil Olahan Data Primer Tahun 2019

Besarnya nilai regresi antara variabel dana silpa (X_3) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten TTU adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_3 X_3 + \epsilon_i$$

$$Y = 28,470 - 7,724 X_3 + \epsilon_i$$

Keterangan:

Y = Tingkat kemiskinan

β_0 = Konstanta Intersept

β_3 = Koefisien variabel dana silpa

X_3 = Variabel dana silpa

ϵ_i = Kesalahan Pengganggu

Nilai $\beta_0 = 28,470$ ini menjelaskan bahwa jika tidak ada perubahan pada variabel dana silpa, maka variabel tingkat kemiskinan sebesar 28,470 tetapi jika ada penambahan pada variabel dana perimbangan sebesar 1 satuan, maka tingkat kemiskinan juga akan menurun sebesar $-7,724$.

Koefisien determinan (R^2) menjelaskan tentang variasi nilai tingkat kemiskinan (Y) ditentukan oleh variabel dana silpa (X_3) yang diperhatikan. Dari hasil analisa koefisien determinan (R^2) diperoleh sebesar 0,001 artinya bahwa besarnya variabel tingkat kemiskinan (Y) dipengaruhi oleh variabel dana silpa (X_1) sebesar 0,01% dan sisanya sebesar 99,9% dipengaruhi oleh variabel X lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Untuk alpha (α) sebesar 0,05 dan $dk = n - k (20 - 3 = 17)$ memperoleh ttabel sebesar 2,1098 dan thitung yang diperoleh sebesar $-0,137$. Dengan demikian maka nilai t hitung lebih besar dari pada nilai t tabel dimana $2,1098 > -0,137$ dan juga nilai signifikansi yang lebih kecil dari alpha ($0,892 > 0,05$); maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel dana silpa (X_3) terhadap variabel tingkat kemiskinan di Kabupaten TTU.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengetahui besarnya pengaruh antara dua atau lebih variable independent terhadap satu variable dependent dan memprediksi variable dependent dengan menggunakan variable independent. Perbedaan dengan regresi linear sederhana adalah dalam regresi linear sederhana menggunakan satu variable independent yang dimasukan dalam model, sedangkan regresi linear berganda menggunakan dua atau lebih variable independent yang dimasukan dalam model (Priyatno, 2013).

Dalam regresi linear berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi yaitu, nilai residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, tidak ada heteroskedastisitas dan tidak adanya autokorelasi pada model regresi. Dalam penelitian ini yang menjadi variable bebas (independent variable) adalah belanja modal (X1), variabel dana perimbangan (X2) dan dana silpa (X3). Sedangkan yang menjadi variable tetap (dependent variable) adalah tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten TTU.

Berikut disajikan hasil olahan data regresi linear berganda untuk mencari tau nilai koefisien pengaruh masing-masing variable bebas (belanja modal (X1), variabel dana perimbangan (X2) dan dana silpa (X3)) terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten TTU.

Dari table output coefficient regresi linear berganda di atas dapat diketahui bahwa Persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \sum_i \dots$$

Keterangan:

Y' = Nilai prediksi variable dependent (Kepuasan Nasabah)

a = Konstanta, yaitu nilai Y' yang didasarkan jika X1, X2 dan X3 sama dengan 0

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$, = Koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variable Y' yang didasarkan variable X1, X2 dan X3.

X1,X2,X3, = Variabel Independent (Belanja modal, dana perimbangan dan dana Silpa).

Berikut ini disajikan output olahan data statistik dengan menggunakan program SPSS 22,0 for windows).

Tabel. 11 Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Konstanta (a)	Koefisien Regresi $b_1X_1, b_2X_2, \text{ dan } b_3X_3$	Nilai Koefisien Korelasi (R)	Nilai R Square (R ²)	Nilai Adjusted R Square	Nilai Sig	Nilai F _{Hitung}
41,045	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belanja modal (b_1X_1): 1,510 ▪ Dana perimbangan (b_2X_2): -3,172 ▪ Dana Silpa (b_3X_3): 1,098 	0,628	0,394	0,281	0,041	3,474

Sumber: Hasil olahan data primer menggunakan program SPSS 22,0

Dari table hasil rekapitulasi di atas diketahui persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:
 $Y' = 41,045 + 1,510X_1 - 3,172X_2 + 1,098X_3 + \sum_i$

Dari olahan data penelitian regresi linear berganda yang tertera dalam table diatas maka dapat dijelaskan:

- a. Nilai $\beta_0 = 41,045$; artinya jika tidak ada perubahan pada variabel belanja modal (X1), dana perimbangan (X2) dan variabel dana silpa (X3) maka tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten TTU sebesar 41,045.
- b. Nilai koefisien regresi variable kualitas produk (β_1) bernilai positif sebesar 1,510. Artinya bahwa: setiap peningkatan belanja modal (X1) sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan (Y) nilainya sebesar 1,510 dengan asumsi nilai variable independent lainnya tetap.
- c. Nilai koefisien regresi variable dana perimbangan (β_2) bernilai negatif sebesar - 3,172. Artinya bahwa: setiap peningkatan dana perimbangan (X2) sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan (Y) juga akan mengalami penurunan atau berkurang sebesar - 3,172 dengan asumsi nilai variable independent lainnya tetap.

- d. Nilai koefisien regresi variable dana silpa (β_3) bernilai positif sebesar 1,098. Artinya bahwa: setiap peningkatan dana silpa (X_2) sebesar 1 satuan maka tingkat kemiskinan (Y) juga akan mengalami peningkatan sebesar 1,098 dengan asumsi nilai variable independent lainnya tetap.
- e. Besarnya nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,628, ini artinya hubungan antara variabel belanja modal (X_1), dana perimbangan (X_2) dan variabel dana silpa (X_3) terhadap variabel tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten TTU terkategori kuat.

Hasil Uji F

Uji F atau uji koefisien regresi secara bersama-sama digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variable independent berpengaruh significant terhadap variable dependent. Dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah variable belanja modal, dana perimbangan dan dana silpa (X_1 , X_2 dan X_3) berpengaruh secara significant terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten TTU. Pengujian menggunakan tingkat alpha sebesar 0,05.

Berikut disajikan tahapan Uji F untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan variable belanja modal, dana perimbangan dan dana silpa (X_1 , X_2 , dan X_3) berpengaruh secara significant terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten TTU.

Rumusan Hipotesis

H_0 : Belanja Modal (X_1), Dana Perimbangan (X_2) dan Dana Silpa (X_3), tidak berpengaruh terhadap Tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten TTU.

H_a : Belanja Modal (X_1), Dana Perimbangan (X_2) dan Dana Silpa (X_3), berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten TTU.

a. Menentukan F Hitung

Dari table ANOVA diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 3,474

b. Menentukan F table

F table dapat dilihat pada table statistik bahwa pada tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1 (jumlah variable - 1) = 3 dan df 3 ($n-k-1$) atau $20-3-1 = 16$ (n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variable independen), hasil diperoleh untuk F table sebesar 3,24,

c. Kriteria Pengujian:

Jika F hitung \leq F table maka H_0 diterima

Jika F hitung $>$ F table maka H_0 ditolak

d. Kesimpulan:

Karena F hitung $>$ F table ($3,474 > 3,24$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

“Kualitas Produk (X_1), Nilai Taksiran (X_2) dan Kualitas Layanan Kredit (X_3), berpengaruh terhadap Kepuasan Nasabah (Y) pada Unit Cabang PT. Pegadaian Kota Kefamenanu”.

e. Pengambilan keputusan berdasarkan signifikansi.

Berdasar signifikansi, jika nilai signifikansi $<$ 0,05 maka H_0 ditolak, dan jika nilai signifikansi $>$ 0,05 maka H_0 diterima. Karena nilai signifikansi pada Uji F kurang dari 0,05 ($0,00 < 0,05$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa “Belanja Modal (X_1), Dana Perimbangan (X_2) dan Dana Silpa (X_3), berpengaruh signifikan terhadap Tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten TTU”.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dengan simbol (R^2) merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Dengan kata lain (R^2) merupakan rasio variabilitas nilai-nilai yang dibuat model dengan variabilitas nilai data asli. Secara umum (R^2) digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model (Priyatno, 2013).

Hasil analisis data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) yang dihasilkan dalam uji regresi berganda adalah sebesar 0,394. Artinya persentase sumbangan pengaruh variable belanja modal (X_1), dana perimbangan (X_2) dan dana silpa (X_3), terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten TTU sebesar 39,4%, sedangkan sisanya sebesar 60,6% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini..

KESIMPULAN

- Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :
1. Belanja modal (X1) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten TTU. Hal ini dibuktikan dari koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar $-8,432$ dan juga nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel ($2,310 > 2,1098$) dengan tingkat signifikansi $0,033 < 0,05$.
 2. Dana Perimbangan (X2) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten TTU. Hal ini dibuktikan dari koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar $-2,826$ dan juga nilai t hitung yang lebih besar dari nilai t tabel ($3,387 > 2,1098$) dengan tingkat signifikansi $0,003 < 0,05$.
 3. Dana Silpa (X3) tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten TTU. Hal ini dibuktikan dari nilai t hitung yang lebih kecil dari nilai t tabel ($0,137 < 2,1098$) dengan tingkat signifikansi $0,892 < 0,05$.
 4. Belanja modal (X1), Dana Perimbangan (X2) dan Dana Silpa (X3), Secara Simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten TTU. Hal ini dibuktikan dari nilai F hitung yang lebih besar dari F table yang bernilai sebesar $3,474 > 3,24$.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik, 2019. *TTU Dalam Angka*.
- Denni Sulistio Mirza, 2012, "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009", Jurnal ekonomi, Hal. 1-15.
- Halim Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat Jakarta.
- Kartasasmita, Koesnadi. 2002. *Organisasi dan Administrasi Internasional*. Lembaga Penerbitan Sekolah Ilmu Administrasi: Bandung.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mahmudi, 2009. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi, Yogyakarta
- Nasir Muhammad, 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nordiawan Dedi, 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011*
- Seran, Sirilius. 2012. *Determinan Faktor Sosial dan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Penduduk*. Fakultas Ekonomi Universitas Timor, Vol 13, No.1.
- Seran, Sirilius. 2011. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Gita Kasih: Kupang.
- Sinaga dan Siregar, 2006. *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Pembangunan Eonomi Daerah di Indonesia*. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Sugiyono. 2004. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Otonomi Daerah No. 23/2014. *Fungsi Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008
- UU Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.